

Implementasi kebijakan dan peran pemerintah lintas sektor dalam pencegahan *stunting* Studi literatur

Putri Herawati, Luthfiah Khumaira, Frisillia Ananda Syahputri, Nasywa Nazhifah, Sri Hajjah Purba*
Fakultas Kesehatan Masyarakat, UIN Sumatera Utara, Medan, Indonesia

INFO ARTIKEL

*Corresponding Author

Email: srihajjah20@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah merencanakan penurunan angka *stunting* dan mengutamakan program nasional untuk mencegah *stunting* dengan merancang Strategi Nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan dan peran pemerintah lintas sektor dalam pencegahan *stunting*. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu studi literatur dengan mencari literatur nasional di Google Scholar dengan ketentuan artikel diterbitkan dalam empat tahun terakhir (2020-2024). Beragam usaha telah dijalankan oleh pemerintah setempat di berbagai wilayah untuk menanggulangi *stunting*, termasuk implementasi kebijakan swasembada gizi, koordinasi antar organisasi, dan penyelarasan kebijakan yang berpusat pada wilayah. Kerja sama antar sektor menjadi elemen krusial dalam mempercepat penurunan tingkat *stunting*, seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Meskipun prevalensi *stunting* mengalami penurunan, masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya integrasi data yang komprehensif dan perlu ditingkatkannya pemahaman konsisten terkait pencegahan *stunting*. Diperlukan kerjasama yang kuat antar berbagai pihak serta perbaikan dalam integrasi data dan pemahaman terhadap isu *stunting* untuk mencapai hasil optimal dalam menurunkan angka *stunting* di Indonesia.

Kata Kunci : Kebijakan, Pemerintah, Pencegahan *Stunting*

ABSTRACT

The Indonesian government has planned to reduce *stunting* rates and prioritizes national programs to prevent *stunting* by designing a National Strategy. This research aims to determine the implementation of policies and the role of government across sectors in preventing *stunting*. The method used in this research is literature study by searching for national literature on Google Scholar provided that the article was published in the last four years (2020-2024). Various efforts have been carried out by local governments in various regions to tackle *stunting*, including implementation of nutrition self-sufficiency policies, coordination between organizations, and harmonization of regionally centered policies. Collaboration between sectors is a crucial element in accelerating the reduction in *stunting* rates, as happened in Nganjuk Regency, East Java. Even though the prevalence of *stunting* has decreased, there are still obstacles in implementing policies, such as a lack of comprehensive data integration and the need to increase consistent understanding regarding *stunting* prevention. Strong collaboration between various parties is needed as well as improvements in data integration and understanding of *stunting* issues to achieve optimal results in reducing *stunting* rates in Indonesia.

Keywords : Policy, Government, *Stunting* Prevention

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berpendapatan menengah yang memiliki angka *stunting* tingkatnya cukup tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain dalam kategori yang sama¹. Menurut informasi dari Kementerian Kesehatan, pada tahun 2023 tingkat *stunting* di Indonesia mencapai 21,5%, mengalami penurunan hanya sebesar 0,1% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 21,6%². Menurut standar WHO, tingkat prevalensi *stunting* seharusnya tidak melebihi 20%. Provinsi-provinsi yang mencatat penurunan jumlah *stunting* paling signifikan adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, dan Banten³.

Pemerintah Indonesia telah merencanakan penurunan angka *stunting* dan mengutamakan program nasional untuk mencegah *stunting* dengan merancang Strategi Nasional. Namun, meskipun ada usaha untuk mewujudkan generasi emas Indonesia, ancaman *stunting* masih menjadi kendala. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi berupaya sepenuhnya untuk mengurangi angka *stunting* di Indonesia⁴.

Diharapkan bahwa kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah untuk mengurangi *stunting* akan berhasil menangani masalah *stunting* di Indonesia. Meskipun demikian, kenyataannya, tingkat *stunting* tetap tinggi dan tidak menunjukkan penurunan yang konsisten selama sepuluh tahun terakhir. Penurunan tingkat *stunting* tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan pemerintah dalam penanggulangannya. Mengamati peran

pemerintah dalam mengatasi stunting serta kondisi permasalahan yang ada, maka pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengeluarkan kebijakan guna mengatasinya⁵.

Pelaksanaan kebijakan adalah langkah penting dalam menjaga kelangsungan upaya merumuskan dan mengatasi masalah, dimulai dari formulasi masalah hingga penerapan solusinya. Ini berkaitan langsung dengan otoritas hierarkis dan kewenangan para pembuat keputusan untuk menjalankan agenda yang ditetapkan. Implementasi kebijakan menjadi tahap krusial di mana kebijakan mulai diterapkan dalam praktiknya. Penerapan kebijakan oleh aparat pemerintah memerlukan keterlibatan dan kerja sama dengan berbagai pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan dan kelompok lain, untuk memastikan bahwa implementasi berjalan lancar dan memiliki dampak yang signifikan⁶. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan pemerintah masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini sesuai dengan penelitian (Sahroji et al., 2022) bahwa pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang dalam mengatasi stunting belum mencapai tingkat optimal, karena beberapa program belum dilaksanakan sepenuhnya dan tidak memberikan manfaat yang signifikan secara langsung bagi masyarakat setempat⁷. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk memahami bagaimana kebijakan dijalankan dan bagaimana peran pemerintah lintas sektor dalam upaya mencegah stunting di Indonesia.

METODE

Jenis penelitian ini melibatkan membaca literatur dan mencari dasar teoritis yang sesuai dengan situasi atau permasalahan yang sedang dibicarakan. Menurut Creswell, John W. (2014: 40), literature review yaitu menyusun ringkasan tulisan dari artikel jurnal, buku, serta dokumen lain yang meringkas teori secara tertulis dan menyediakan informasi yang tepat, bahkan pada saat ini dalam waktu ketika mengatur referensi ke topik dan dokumen yang relevan⁸.

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian berdasarkan literatur (Study Literature) (Wahyudi, 2022) dengan kriteria sebagai berikut: mencari literatur nasional yang tersedia di Google Scholar, merujuk pada artikel-artikel yang telah diterbitkan dalam empat tahun terakhir (2020-2024), dan merupakan artikel lengkap mengenai implementasi kebijakan dan peran pemerintah lintas sektor dalam pencegahan stunting di Indonesia yang dapat menurunkan angka kejadian stunting, dengan pengumpulan data menggunakan kata kunci berikut: implementasi, kebijakan, peran lintas sektor, pencegahan stunting. Data yang sudah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deskriptif. Setelah itu dianalisis, tidak terlalu mengungkap, tetapi juga memberikan wawasan dan kejelasan⁹.

HASIL PENELITIAN

Berdasarkan pencarian artikel dengan kata kunci “implementasi” dan “peran lintas sektor” dan “pencegahan *stunting*” dan sesuai dengan kriteria dan memenuhi syarat untuk dianalisis lebih lanjut, penulis mendapatkan 8 artikel dari 2.080 artikel di *Google Scholar* yang sesuai dengan kriteria dan digunakan sebagai bahan penelitian untuk menganalisis penerapan kebijakan dan peran pemerintah lintas sektor dalam pencegahan *stunting* di berbagai wilayah di Indonesia, hasil analisis dijelaskan dalam tabel berikut.

Tabel 1. Hasil Implementasi Kebijakan dan Peran Pemerintah Lintas Sektor Dalam Pencegahan *Stunting* Pada Anak di Berbagai Wilayah Indonesia

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Krosby, S. S., Rahmi, S. A & Mintasrihardi (2024)	Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan <i>Stunting</i> Terintegrasi Di Kota Mataram	Studi ini menerapkan metode penelitian kualitatif deskriptif. Dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, dokumentasi dan observasi.	Penerapan kebijakan dan percepatan pencegahan <i>stunting</i> secara terintegrasi berdasarkan kebijakan dari Pemerintah Gubernur Kota Mataram No 68 Tahun 2020 masih belum optimal di kelurahan Jempong Baru. Menurut analisis yang menggunakan teori implementasi kebijakan <i>Van Meter</i> dan <i>Van Horn</i> di Kelurahan Jempong Baru, diketahui bahwa beberapa indikator masih belum terpenuhi dengan baik. Yang dimana; 1. Sumber daya manusia di tingkat terendah, terutama

				<p>para kader, masih kurang memadai baik dalam hal jumlah maupun kualitas.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Belum tersedia sumber daya finansial yang khusus untuk menangani <i>stunting</i>. 3. Pemahaman masyarakat tentang kebijakan masih rendah di antara para pelaksana. 4. Situasi ekonomi, sosial, dan politik masih Belum sepenuhnya memberikan dukungan yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan dari kebijakan pencegahan stunting yang terpadu¹.
2.	Saputra, A. S., Suryoto & Sutikno, C (2022)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Kabupaten Solok	<p>Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yang melibatkan partisipasi informan dan menerapkan metode triangulasi data dan melakukan analisis data. Selama pelaksanaan, peneliti mencoba melihat dari sudut pandang yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dan organisasi dalam pelaksanaannya, mengadopsi pendekatan <i>bottom-up</i>.</p>	<p>Keberhasilan pelaksanaan kebijakan penanggulangan <i>stunting</i> di Kabupaten Purbalingga diakui karena pendekatannya yang komprehensif, yang memperhatikan berbagai aspek termasuk kebijakan, partisipasi pihak terlibat, organisasi, dan faktor lingkungan, sehingga dapat dijalankan dengan efektif. Dari perspektif pemerintah daerah, upaya dilakukan untuk menggandeng dan bekerja sama dengan beragam badan daerah terkait, dengan tujuan agar bisa bekerja secara sinergis dalam menangani masalah <i>stunting</i> di Kabupaten Purbalingga. Selain lembaga pemerintah, kelompok posyandu di setiap wilayah juga terlibat dalam upaya menanggulangi <i>stunting</i>, yang sudah terhubung dengan dinas kesehatan di Kabupaten Purbalingga⁶.</p>
3.	Promes, Y. L., Rahawarin, M. A & Pattimukay, H. V. R (2023)	Implementasi Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku	<p>Penelitian ini menerapkan metode deskriptif kualitatif, di mana data diperoleh melalui wawancara dengan informan yang terlibat.</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan untuk mencegah dan mengatasi <i>stunting</i> di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah masih belum mencapai tingkat optimal, dengan beberapa faktor di antaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan yang dilaksanakan di pemerintahan Negeri Trana sejalan dengan kebijakan

yang diimplementasikan oleh pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah, terutama dalam hal pelaksanaan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2020 yang berkaitan dengan upaya pencegahan dan pengurangan angka stunting di wilayah tersebut. Namun, penerapannya di tingkat pemerintah desa sedang mengalami tantangan, terutama karena dampak pandemi Covid-19.

2. Tenaga kerja di Negeri Trana masih belum memenuhi standar yang memadai, baik dari sisi jumlah maupun kualitas terutama di level paling bawah.
3. Di Negeri Trana, organisasi pelaksana belum mencapai standar yang memadai karena masih ada pelaksana yang tidak mengikuti prosedur operasional standar saat menjalankan kebijakan.
4. Para pelaksana menunjukkan sikap yang positif dan tanggap dalam menjalankan kebijakan, tetapi masih ada kekurangan dalam pemahaman mereka tentang pelaksanaan kebijakan tersebut.
5. Komunikasi dan penyalarsan antara pelaksana kebijakan *stunting* di tingkat yang lebih rendah masih kurang, menyebabkan beberapa upaya pencegahan *stunting* tidak sesuai target.
6. Situasi di Negeri Trana, baik secara sosial, ekonomi, maupun politik, belum optimal untuk memastikan keberhasilan dalam menerapkan kebijakan pencegahan dan penanggulangan *stunting*¹⁰.

4.	Febrilianda, M & Yusran, R (2023)	Implementasi Konvergensi	Penelitian ini menerapkan	Implementasi kebijakan pencegahan <i>stunting</i> di
----	-----------------------------------	--------------------------	---------------------------	--

		<p>Kebijakan Pencegahan <i>Stunting</i> Berbasis Nagari di Kecamatan Mungka, Kabupaten Lima Puluh Kota</p>	<p>metode deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk menjelaskan secara terperinci, dan menafsirkan situasi atau peristiwa dengan cara yang sesuai. Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi, yakni dengan memeriksa data dari berbagai sumber, termasuk pengamatan, interview, dan bahan pustaka.</p>	<p>Kecamatan Mungka sudah melalui sejumlah program. Namun, upaya tersebut belum berhasil mencapai target yang diharapkan. Penyebabnya bermacam-macam, termasuk minimnya keterlibatan pemerintah nagari dalam menurunkan angka <i>stunting</i> di Nagari Mungka, ketidakpartisipasian ibu hamil dan ibu balita dalam program yang disediakan oleh bidan desa disebabkan oleh kurangnya dukungan. dan belum adanya program khusus penurunan <i>stunting</i> yang dijalankan. Koordinasi antar organisasi yang menjalankan kebijakan juga memegang peran penting dalam tingkat kerjasama dan komunikasi dalam pelaksanaan kebijakan ini¹¹.</p>
5.	Anita., dkk (2024)	<p>Analisis Implementasi Kebijakan Swasembada Gizi Dalam Upaya Pencegahan dan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Kabupaten Lampung Selatan</p>	<p>Penelitian ini adalah analisis yang mendeskripsikan secara kualitatif, dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur sebagai alat penelitian. Pengolahan data dilakukan dengan menerapkan pendekatan pengkodean secara deduktif. yang mengacu pada teori <i>Grindle</i>, fokusnya adalah pada isi dan konteks kebijakan. Untuk memperkuat validitas hasil, metode triangulasi digunakan melalui <i>Focus Group Discussion</i> (FGD).</p>	<p>Hasil riset menunjukkan bahwa semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah meresapi dengan seragam konsep tentang pelaksanaan kebijakan pencapaian swasembada gizi. Buku praktis telah berhasil disusun untuk mempercepat penurunan <i>stunting</i> dengan panduan teknis implementasi kebijakan di tingkat Kabupaten. Namun, masih terdapat beberapa rintangan yang harus diatasi seperti ketiadaan Prosedur Operasional Standar (SOP) untuk meningkatkan pemahaman yang konsisten mengenai tugas pokok dan fungsi; Ketidakhadiran penyatuan data yang lengkap dari 64 penunjuk <i>stunting</i> yang tersebar di berbagai lembaga pemerintah daerah, ditambah dengan adanya penolakan dan diskriminasi yang dialami oleh orangtua yang memiliki anak berisiko stunting, telah mengakibatkan penurunan akses terhadap layanan kesehatan¹².</p>
6.	Pratiwi, D. A (2023)	<p>Implementasi Kebijakan Penanggulangan</p>	<p>Penelitian ini menerapkan pendekatan</p>	<p>Pelaksanaan kebijakan pencegahan <i>stunting</i> yang terintegrasi di Kota Batam</p>

		Stunting di Kota Batam	kualitatif dengan pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara secara mendalam, observasi, dan analisis dokumen. Pemilihan partisipan dilakukan melalui metode <i>purposive sampling</i> .	sukses mengurangi angka <i>stunting</i> . Faktor-faktor yang berkontribusi pada kesuksesan ini mencakup peningkatan komunikasi, alokasi sumber daya yang mencakup SDM, anggaran, dan fasilitas yang memadai, kesiapan pelaksana kebijakan dengan tim yang sesuai dan komitmen yang kuat, serta struktur birokrasi yang menerapkan koordinasi yang terstruktur dan melakukan pemantauan serta evaluasi secara berkala. Walaupun tujuan telah tercapai, perbaikan dalam komunikasi, peningkatan sumber daya, dan pemantauan yang lebih efektif masih diperlukan guna meraih hasil yang optimal ¹³ .
7.	Sahroji, Q. N., Hidayat. R & Nababan, R (2022)	Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan <i>Stunting</i> di Kabupaten Karawang	Metode penelitian ini yaitu kualitatif deskriptif untuk menguraikan konteks sosial, melakukan analisis data berdasarkan temuan faktual, yang kemudian dapat disusun menjadi hipotesis dan teori melalui pendekatan induktif.	Pelaksanaan kebijakan Dinas Kesehatan terkait penanganan <i>stunting</i> masih belum optimal di Kabupaten Karawang karena beberapa program belum terlaksana sepenuhnya dan tidak memberikan dampak yang signifikan kepada penduduk setempat. Tenaga kerja yang terlibat dalam implementasi kebijakan juga masih kurang memadai secara kualitasnya. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan tersebut juga masih rendah, serta kesadaran akan pentingnya gaya hidup sehat seperti kesehatan lingkungan, reproduksi, dan pola makan bergizi masih belum mencapai tingkat yang diharapkan untuk mengurangi <i>stunting</i> ⁷ .
8.	Yusdiana., Putri, R. N & Sintindaon R. SE (2023)	Implementasi Kebijakan Penanggulangan <i>Stunting</i> di Puskesmas Balai Kabupaten Banyuasin	Studi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dan mengandalkan panduan untuk wawancara mendalam. Dengan pengambilan informan dilakukan melalui metode <i>Purposive Sampling</i> .	Kebijakan penurunan <i>stunting</i> di Puskesmas Pangkalan Balai telah diterapkan secara efektif sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 49 Tahun 2018. Langkah ini mengacu pada usaha untuk mempercepat langkah-langkah yang terintegrasi dalam mencegah, mengendalikan, dan mengurangi tingkat <i>stunting</i> , serta Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuasin, bersama

dengan semua Puskesmas di wilayah tersebut, melakukan pelaksanaan Program Rembuk *Stunting*, demi mempercepat penurunan angka *stunting* di wilayah tersebut. Para tenaga kesehatan di Puskesmas Pangkalan Balai telah diberi informasi mengenai strategi untuk mengatasi *stunting* dengan tujuan agar dapat dipahami dan diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Pegawai di Puskesmas Pangkalan Balai sudah memadai dalam mendukung program penanggulangan *stunting*. Mereka juga telah dilatih agar dapat mendukung kemampuan staf secara maksimal. Fasilitas yang ada di Puskesmas Pangkalan Balai sudah memadai dan sesuai untuk melaksanakan program penanggulangan *stunting*. Dan Petunjuk teknis telah disiapkan untuk menerapkan kebijakan penanggulangan *stunting*, yang mencakup arahan pelaksanaan langkah-langkah untuk mengatasi *stunting*, langkah-langkah penanganan *stunting*, panduan pemberian makanan tambahan, ketentuan mengenai suplemen darah tambahan, serta panduan intervensi terpadu untuk mengurangi *stunting*. Semua prosedur tersebut digunakan sebagai panduan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan *stunting*¹⁴.

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil di atas, penelitian yang dilakukan di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan masih terdapat tantangan dalam mengimplementasikan kebijakan pencegahan *stunting* yang mengakibatkan belum tercapainya target penurunan *stunting* di Indonesia. Tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan finansial, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar organisasi, serta dukungan yang tidak optimal dari masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan kebijakan juga sangat bergantung pada pendekatan komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, organisasi lokal, dan masyarakat.

Angka kasus *stunting* di Indonesia tahun 2023 mencapai 21,5% dari tahun sebelumnya yaitu 21,6%. Artinya angka penurunan *stunting* hanya 0,1%, dimana masih jauh dari target pemerintah Indonesia untuk angka *stunting* harus mencapai 14% demi memenuhi standart angka *stunting* menurut WHO yang harus dibawah 20%³. Karena tingginya jumlah kasus *stunting* di Indonesia,

pemerintah pusat merasa perlu untuk mengambil langkah tegas dalam menanganinya. Tujuan mempercepat penurunan angka stunting diperlakukan melalui penerbitan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021¹.

Tahap implementasi kebijakan sangat penting, karena pada tahap ini kebijakan mulai diberlakukan⁶. Implementasi kebijakan dalam pencegahan *stunting* pada anak di Indonesia juga sangat membutuhkan peran aktif dari pemerintah daerah. Posisi strategis pemerintah daerah terletak pada kedekatannya dengan masyarakat serta pemahaman yang lebih baik terhadap kondisi khusus di setiap wilayah. Dalam pencegahan *stunting*, pemerintah daerah harus berkolaborasi dengan sektor-sektor terkait untuk mengintegrasikan program-program nasional dengan kebutuhan lokal¹⁵. Dengan kerjasama yang erat antara pemerintah pusat dan daerah, serta kolaborasi lintas sektor baik bidang kesehatan maupun non kesehatan, upaya pencegahan *stunting* bisa dilaksanakan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan¹⁶.

Kebijakan untuk menurunkan tingkat stunting harus disokong oleh kebijakan yang berintegritas tinggi, diperkuat dengan sumber daya manusia yang cukup dan berkualitas¹⁷. Studi yang dilakukan oleh (Sahroji et al., 2022) membuktikan bahwa pelaksanaan kebijakan dinas kesehatan kabupaten karawang dianggap berhasil dalam mengatasi masalah *stunting* di Kabupaten Karawang namun belum optimal karena program-programnya belum sepenuhnya terlaksana dan kurangnya dampak signifikan pada masyarakat. Hal ini disebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dan SDM yang tidak memadai yang menjadi hambatan utama dalam penanganan *stunting*⁷. Sejalan dengan penelitian (Pormes et al., 2023) di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah mengatakan bahwa tenaga kesehatan yang belum memadai, kondisi sosial ekonomi serta politik akibat COVID-19 dan kurangnya komunikasi antar pelaksana kebijakan juga menjadi faktor penghambat utama⁹.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh (Krosby et al., 2024) di Kota Mataram juga mengalami hambatan yang sama menunjukkan bahwa implementasi kebijakan daerah dalam penanganan *stunting* juga belum optimal. Faktor penghambatnya adalah sumber daya manusia khususnya para kader masih kekurangan baik dari segi jumlah maupun kualitas, dana khusus program *stunting* belum tersedia, pemahaman dan sikap masyarakat terhadap kebijakan kurang memadai, dan faktor ekonomi, sosial politik juga belum sepenuhnya mendukung keberhasilan pelaksana kebijakan pencegahan *stunting*¹. Keberhasilan suatu kebijakan bergantung pada anggaran yang tersedia untuk mendukung program-program intervensi *stunting*. Untuk memastikan program pencegahan *stunting* berjalan dengan baik, diperlukan alokasi anggaran khusus¹⁸.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan (Pratiwi, 2023) menemukan bahwa kebijakan pencegahan *stunting* di Batam berhasil mengurangi angka *stunting*. Faktor-faktor yang berkontribusi meliputi peningkatan komunikasi, alokasi sumber daya yang memadai, kesiapan pelaksana kebijakan, dan struktur birokrasi yang efektif. Namun, masih diperlukan perbaikan dalam komunikasi dan pemantauan untuk mencapai hasil yang lebih optimal¹². Hal ini sejalan dengan temuan Anita et al. (2024) di Kabupaten Lampung Selatan yang menyoroti pentingnya SOP yang jelas dan integrasi data yang komprehensif untuk efektivitas kebijakan¹¹.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terkait implementasi kebijakan dan peran pemerintah lintas sektor dalam pencegahan stunting, dapat disimpulkan beberapa hal penting:

- a. Pemerintah daerah di berbagai wilayah di Indonesia sedang melakukan berbagai langkah untuk mencegah dan menanggulangi stunting, seperti implementasi kebijakan swasembada gizi, enyelarasan dalam melaksanakan kebijakan untuk mencegah stunting, dan konvergensi kebijakan pencegahan stunting berbasis nagari.
- b. Kerjasama antar sektor menjadi faktor utama dalam mempercepat penurunan angka stunting, seperti yang terjadi di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, di mana kerjasama antar sektor berperan penting dalam upaya pencegahan stunting.
- c. Meskipun prevalensi stunting di Indonesia mengalami penurunan, masih ditemukan beberapa kendala dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya integrasi data yang komprehensif, penolakan dan stigma yang dialami oleh orangtua anak yang berisiko stunting, serta perlu

ditingkatkannya pemahaman konsisten mengenai tugas pokok dan fungsi terkait pencegahan stunting.

Dengan demikian, implementasi kebijakan dan peran pemerintah lintas sektor dalam pencegahan stunting pada anak di Indonesia memerlukan kerjasama yang kuat antar berbagai pihak serta perbaikan dalam integrasi data dan pemahaman terhadap isu stunting untuk mencapai hasil terbaik dalam menurunkan angka stunting di Indonesia.

REFERENSI

1. Krosby, S. S., Rahmi, S. A., & Mintasrihardi. (2024a). Implementasi Kebijakan Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi Di Kota Mataram. *Jurnal Tata Sejuta STIA MATARAM*, 10(1), 30–43.
2. Papua, D. (2024). Menkes Budi Soroti Lambatnya Penurunan Angka Stunting di Indonesia. Dinas Kesehatan Provinsi Papua. <https://dinkes.papua.go.id/menkes-budi-soroti-lambatnya-penurunan-angka-stunting-di-indonesia/#:~:text=Berdasarkan data Kementerian Kesehatan%2C angka,yang sebesar 21%2C6 persen>
3. Kemenkes RI. (2023). Prevalensi Stunting di Indonesia Turun ke 21,6% dari 24,4%. Sehat Negeriku Kemkes.
4. Parwati, T., & Surya, N. T. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Stunting Dalam Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Pis-Pk) Studi Kasus Di Puskesmas Jatiyoso. *Universitas Kusuma Husada Surakarta*, 39, 1–14.
5. Gusdiva, N., Koeswara, H., & Putera, R. E. (2024). Implementasi Kebijakan Penurunan Stunting Di Kabupaten Solok. *Gema Publica*, 9(1), 32–49. <https://doi.org/10.14710/gp.9.1.2024.32-49>
6. Saputra, A. S., Suryoto, & Sutikno, C. (2022). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Kabupaten Purbalingga. *Publikauma : Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 10(2), 162–170.
7. Sahroji, Q. N., Hidayat, R., & Nababan, R. (2022). Implementasi Kebijakan Dinas Kesehatan Dalam Penanganan Stunting Di Kabupaten Karawang. *Jurnal Pemerintah Dan Politik*, 7 (1), 34–39.
8. Hasby, B.A. (2017). Seni Memahami Penelitian Kualitatif Dalam Bimbingan dan Konseling: Studi Literatur. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa*, 1(2), 90-100.
9. Wahyudi. (2022). Literature Study: Efficacious Indonesian Herbs for Lowering Cholesterol Levels. *Journal Of Pharmacy and Science*, 5(2), 36–45.
10. Pormes, Y. L., Rahawarin, M. A., & Pattimuka, H. V. R. (2023). Implementasi Kebijakan Pencegahan Dan Penanggulangan Stunting Di Negeri Trana Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah. *Professional: Jurnal Komunikasi Dan Administrasi Publik*, 10(2), 461–470. <https://doi.org/10.37676/professional.v10i2.4369>
11. Febrilianda, M., & Yusran, R. (2023). IMPLEMENTASI KONVERGENSI KEBIJAKAN PENCEGAHAN STUNTING BERBASIS NAGARI DI KECAMATAN MUNGKA, KABUPATEN LIMA PULUH KOTA. *Santhet: (Jurnal Sejarah, Pendidikan Dan Humaniora)*, 7 (2), 608–612.
12. Anita, Aprina, Sudarmi, Rusyantia, A., Pranajaya, & Astuti, T. (2024). ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SWASEMBADA GIZI DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN STUNTING DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN. *MAHESA: Malahayati Health Student Journal*, 4 (3), 1007–1025.
13. Pratiwi, D. A. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting Di Kota Batam. *Jurnal EL-RIYASAH*, 14(1), 15. <https://doi.org/10.24014/jel.v14i1.22859>
14. Yusdiana, Y., Putri, R. N., & Sitindaon, R. S. (2023). Implementasi Kebijakan Penanggulangan Stunting di Puskesmas Pangkalan Balai Kabupaten Banyuasin. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 23(3), 3125. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v23i3.4568>
15. Imron, A., Dini, C. Y., Pratama, S. A., Aziz, U. K., Mudiayah, S., Herowati, D., & Hartanti, F. I. (2022). SINERGI LINTAS SEKTOR DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN NGANJUK , JAWA TIMUR C. *Media Gizi Indonesia (National Nutrition Journal)*, SP(1), 239–243.

16. Puansah, I., Pulungan, D. S., Nurpaisah, Y., Wahyuni, D., Gultom, A. W., & Ramadhani, L. (2023). Kebijakan Pemerintah Desa Terhadap Pencegahan Stunting Di Desa Pagaran Gala-Gala Kecamatan Panyabungan Selatan. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah*, 7(2), 532-537.
17. Kurniawan, I., Misnaniarti, M., & Flora, R. (2021). Analisis Implementasi Intervensi Gizi Spesifik dalam Penanganan Stunting di Puskesmas Wilayah Kabupaten Bengkulu Utara. *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, 6(4), 328. <https://doi.org/10.30829/jumantik.v6i4.10089>
18. Febrian F, & Yusran R. (2021). Koordinasi dalam Implementasi Kebijakan Pencegahan Stunting di Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)* , 3(1), 11-21.